

**TABEL T-V. C.2**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**PROVINSI JAMBI**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (x 1000)				CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	13	14	15	
<b>2</b>	<b>WAJIB</b>								
<b>2 15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>								
<b>2 15 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI</b>								
2 15 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	Kota Jambi	80%	1,400,000	APBD	80%	1,400,000	
2 15 01	1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam bidang	Kota Jambi	80%	1,200,000	APBD	80%	1,200,000	
2 15 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran dan kenyamanan tugas aparatur	Kota Jambi	80%	1,300,000	APBD	80%	1,300,000	
2 15 01	1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Jambi	80%	1,400,000	APBD	80%	1,300,000	
2 15 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi	Kota Jambi	80%	900,000	APBD	80%	900,000	
2 15 01	1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik	Kota Jambi	80%	1,800,000	APBD	80%	2,300,000	
<b>2 15 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>								
2 15 02	1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Provinsi Jambi	70%	3,500,000	APBD	80%	4,000,000	
2 15 02	1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya fasilitas Keselamatan Jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis	Provinsi Jambi	65%	19,034,041	APBD	70%	10,000,000	
2 15 02	1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terpenuhinya SPM Pelayanan Terminal Tipe B	Provinsi Jambi	75%	4,500,000	APBD	80%	5,000,000	
2 15 02	1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi Jambi	25%	4,500,000	APBD	30%	5,000,000	
2 15 02	1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Provinsi Jambi	60%	425,000	APBD	70%	6,000,000	
2 15 02	1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksanya Audit dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan	Provinsi Jambi	80%	1,125,000	APBD	85%	700,000	
2 15 02	1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan	Provinsi Jambi	75%	4,000,000	APBD	75%	4,500,000	
2 15 02	1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten	Provinsi Jambi	55%	750,000	APBD	60%	750,000	
2 15 02	1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten	Provinsi Jambi	65%		APBD	70%	5,000,000	
2 15 02	1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten	Provinsi Jambi	25%		APBD	30%	450,000	
2 15 02	1.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	Provinsi Jambi	15%		APBD	20%	200,000	
2 15 02	1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	15%		APBD	20%	3,500,000	
2 15 02	1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	15%		APBD	20%	200,000	
2 15 02	1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	75%	550,000	APBD	80%	500,000	
<b>2 15 3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>								
2 15 03	1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	15%	300,000	APBD	20%	300,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (x 1000)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000)				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CAPAIAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	15	03	1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat		APBD			
2	15	03	1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	10%	300,000	APBD	15%	300,000
2	15	03	1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	10%	250,000	APBD	15%	250,000
2	15	03	1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	10%	500,000	APBD	15%	500,000
2	15	03	1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terpenuhinya Perizinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	10%	500,000	APBD	15%	500,000
2	15	03	1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah	Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	10%	300,000	APBD	15%	300,000
2	15	03	1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	50%	1,500,000	APBD	70%	2,500,000
2	15	03	1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	20%	4,000,000	APBD	30%	4,000,000
2	15	03	1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	15%	4,400,000	APBD	20%	3,500,000
2	15	03	1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	30%	500,000	APBD	35%	400,000
2	15	03	1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan Regional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	15%	550,000	APBD	20%	200,000
2	15	03	1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	15%	200,000	APBD	20%	200,000
2	15	03	1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	15%	300,000	APBD	20%	200,000
2	15	03	1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	15%	200,000	APBD	20%	200,000
2	15	03	1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat	15%	200,000	APBD	20%	200,000
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>05</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>				APBD			
2	15	05	1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersediannya Rencana Induk Perkeretaapian	Provinsi Jambi	80%	1,500,000	APBD	80%	2,500,000
2	15	05	1.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Terpenuhinya Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Provinsi Jambi	15%	200,000	APBD	20%	200,000
2	15	05	1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	15%	250,000	APBD	20%	250,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (x 1000)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000)					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CAPAIAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	13	14	15				
2	15	05	1.04	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	15%	200,000	APBD		20%	200,000
2	15	05	1.05	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terwujudnya Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Provinsi Jambi	15%	200,000	APBD		20%	200,000
2	15	05	1.06	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	15%	400,000	APBD		20%	500,000
2	15	05	1.07	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Terwujudnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Provinsi Jambi	15%	200,000	APBD		20%	200,000
2	15	05	1.08	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	15%	550,000	APBD		20%	600,000
<b>JUMLAH DANA</b>								<b>63,884,041</b>				<b>72,400,000</b>

**Plt. KEPALA DINAS**

**Drs. H. ISMED WIHAYA, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19701025 199003 1 002